BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dalam perekonomian Indonesia, indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. UMKM selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup pengaman di masa krisis, melalui mekanisme penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah. Peran dan fungsi strategis ini sesungguhnya dapat ditingkatkan dengan memerankan UMKM sebagai salah satu pelaku usaha komplementer bagi pengembangan perekonomian nasional, dan bukan subordinasi dari pelaku usaha lainnya. Keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan UMKM berarti memperkokoh perekonomian masyarakat. Hal ini akan membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus memberi dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi pemerintahan.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Saat ini, UMKM berkembang dengan pesat di seluruh Indonesia tak terkecuali dengan perkembangan UMKM di Provinsi Banten yang merupakan

salah satu provinsi di Indonesia. Banten sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk padat serta memiliki tingkat pengangguran yang tinggi walaupun Banten merupakan daerah industri tetapi masih banyak masyarakatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan terutama Kota Cilegon. Dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Cilegon , 2010–2014

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin
		Jumlah
2010	246 662	16 765
2011	261 962	15 453
2012	277 875	15 000
2013	295 100	15 900
2014	306 253	15 530

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon
Source: BPS-Statistic of Cilegon City

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Cilegon berfluktuatif setiap tahunnya, hal ini dikarenakan Badan Pusat Statistik (BPS) Cilegon saat ini sulit mendapatkan data kemiskinan di Kota Cilegon. Hal tersebut karena sebagian warga dinilai kurang pro-aktif saat dikunjungi petugas survei. Petugas BPS kerap kesulitan saat mengunjungi objek warga, banyak sasaran survei tidak mau menjawab pertanyaan petugas. Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2012-2013 sebanyak 900 orang.

Untuk mengentaskan kemiskinan Walikota Cilegon memiliki program *One District One Billion* (Satu Kecamatan Satu Miliar), dengan cara memberikan bantuan dana bergulir kepada masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Cilegon, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor.25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon. Program *One District One Billion* ini ditujukan kepada calon wirausaha baru, serta pelaku usaha ekomoni mikro dan kecil yang tengah meretas jalan untuk berusaha, mereka yang ingin

mengembangkan ekonomi keluarga, dan juga mereka yang ingin mengembangkan kapasitas usahanya, Adapun calon wirausahawan baru ini adalah warga miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang selama ini mendapat bantuan dari pemerintah seperti beras bersubsidi (raskin), BOS dan sebagainya yang memiliki kemauan untuk berwirausaha, namun terkendala masalah modal. Sedangkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah warga yang sudah lama menekuni dunia usaha, namun memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usahanya. Dengan digulirkannya program tersebut, diharapkan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses permodalan yang cepat dan mudah. Pada tahap awal kegiatan program ini, Pemkot Cilegon menargetkan setiap tahun lahir 100 wirausahawan baru di setiap kecamatan, berarti bila ada 8 kecamatan, maka sekitar 800 wirausahawan baru lahir di wilayah Kota Cilegon.

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (LPEM) didirikan oleh Walikota Cilegon yang ditetapkan melalui peraturan walikota Cilegon No. 29 Tahun 2005 pada tanggal 7 Oktober. Namun dalam perjalanan perkembangannya LPEM mengalami perubahan melalui peraturan walikota No. 11 tahun 2007 tertanggal 19 April 2007, maka sejak itu LPEM berubah nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT-PEM) yang dipimpin oleh seorang kepala UPT dimana teknis operasional maupun administrasi dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Cilegon.

UPT-PEM adalah kegiatan untuk memampukan dan memberikan tanggungjawab kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha/wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat UPT-PEM memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk berwirausaha. UPT-PEM didirikan bertujuan untuk :

1. Memberdayakan keluarga/anggota keluarga yang tidak bekerja agar dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi produkif.
2. Menumbuhkan dan meningkatkan minat usaha masyarakat yang tidak bekerja, miskin dan menganggur/PHK.

3. Mengatasi permodalan Usaha Mikro Kecil yang belum memenuhi persyaratan perbankan (Non Bankable)
4. Mengembangkan potensi komoditas unggulan Usaha Kecil
5. Meningkatkan akses, memenuhi kebutuhan input, menyediakan media pemasaran, mengembangkan potensi pasar.

Salah satu program yang dikelola UPT-PEM adalah *One District One Million*, ini merupakan program kerja sama antara Pemkot Cilegon dengan PT Krakatau Steel, yang diluncurkan pada pertengahan Juni 2011 dan efektif dilaksanakan Juli 2011, adapun dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 9 miliar yang bersumber dari APBD Kota Cilegon Rp 5 miliar dan PT Krakatau Steel sebesar Rp 4 miliar. Di Kota Cilegon terdapat 8 kecamatan, tiap kecamatan dialokasikan sebesar Rp 1 miliar, sehingga dana yang digulirkan sebesar Rp 8 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp 1 miliar disiapkan untuk operasional dan cadangan bila kebutuhan terus meningkat. Pinjaman dana dalam program *One District One Million* ini bervariasi, pinjaman dana bergulir tersebut mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 30 juta, besaran pinjaman dana dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1.2

Besaran Pinjaman Dana UPT-PEM

Tingkatan Pinjaman	Besaran Dana
Perintisan	Rp 300.000 – Rp 2.000.000
Penguatan	Rp 2.500.000 – Rp 4.500.000
Pengembangan	Rp 5.000.000 – Rp 30.000.000

Sumber: data UPT-PEM Kota Cilegon

Hasil yang ingin dicapai pemerintah untuk jangka pendek adalah dapat teratasinya permasalahan UMKM dalam mengakses modal, pasar dan tekhnologi. Khusus untuk permodalan diharapkan UMKM yang terjerat bank keliling dapat tertolong atau terbantu, melalui pinjaman modal yang disalurkan UPT- PEM dengan tingkat suku bunga hanya 3-6%. Sedangkan hasil jangka panjang yang ingin dicapai adalah meningkatnya pendapatan pengusaha, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), selain itu dengan tumbuh berkembangnya usaha UMKM akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Jenis pinjaman pada program ini diantaranya : perintisan usaha sasaran RTS, penguatan usaha sasaran UMK Non RTS termasuk koperasi, dan pengembangan usaha, sasaran UMK dan koperasi.

1. Biaya/Jasa administrasi pinjaman : 0-6% per tahun
2. Jangka waktu pinjaman : 1 bulan – 24 bulan (2 tahun)
3. Jenis usaha : perdagangan, jasa, pengolahan, pertanian
4. Angsuran pinjaman : harian/mingguan/bulanan

Untuk jasa pinjaman atau bunga dibedakan antara Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan pelaku UMKM. Bunga untuk RTS 0% - 3% per tahun, sedangkan bunga untuk pelaku UMKM 6% per tahun. Bila dibandingkan dengan bunga yang berlaku saat ini, maka dalam program *One District One Billion* ini jauh sekali di bawah bunga perbankan, apalagi dihadapkan dengan bank keliling. Prosedur peminjaman adalah warga dapat langsung mengajukan pinjaman dana ke kantor UPT-PEM dengan persyaratan yang ringan seperti fotokopi KTP, fotocopi KK, dan lain-lain. Pengelola UPT-PEM sebanyak empat orang yang terdiri dari Kepala Kantor, Tenaga Seleksi/Analis Pinjaman, Kasir, dan Tenaga Konsultasi Manajemen. Guna memperlancar tugas UPT-PEM, maka di tiap-tiap kelurahan ditunjuk seorang pendamping yang bertugas menyeleksi warga yang mengajukan pinjaman dana, membina, dan sekaligus menagih uang angsuran. Jenis usaha para penerima dana bergulir beragam yang meliputi usaha martabak, warung nasi uduk, warung makan, bengkel motor, usaha keripik, warung sembako, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lagi berikut data jumlah orang yang mendapat dana pinjaman disetiap kecamatan di kota Cilegon:

Tabel 1.3

Jumlah Penerima Pinjaman UPT-PEM Berdasarkan Kecamatan Di Kota Cilegon Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Dana	Jumlah orang
1.	Grogol	256.300.000	104 orang
2.	Cibeber	363.600.000	141 orang
3.	Ciwandan	345.900.000	116 orang
4.	Purwakarta	105.100.000	46 orang
5.	Cilegon	161.900.000	93 orang
6.	Jombang	376.600.000	221 orang
7.	Citangkil	497.000.000	159 orang
8.	Pulomerak	193.000.000	89 orang

Sumber : data UPT-PEM Kota Cilegon

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin (RTS), meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha, serta mewujudkan usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi yang tangguh dan mandiri dengan sasaran, RTS, UMK dan koperasi. Namun pemerintah Kota Cilegon menghadapi kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Cilegon seperti :

1. Masyarakatnya tidak mempunyai keberanian untuk mengambil resiko maka tidak akan berhasil usahanya. Dalam berwiraswasta dibutuhkan keberanian bagi pelaku usaha untuk siap menghadapi segala resiko apabila usahanya tidak dapat berjalan dengan baik pelaku usaha harus mampu menemukan solusinya sehingga usahanya dapat berjalan kembali.
2. Begitu pula dengan kreativitas yang tinggi, masih banyak pelaku usaha di Kota Cilegon yang tidak memiliki kreativitas sehingga tidak dapat menciptakan inovasi-inovasi atau ide-ide apabila usahanya dan akhirnya usahanya menjadi pailit.
3. Masyarakat Kota Cilegon kurang mempunyai Kemampuan mencari peluang. Sedangkan dalam berwirausaha sangat dibutuhkan, tidak hanya otak yang cerdas atau modal yang besar saja akan tetapi seorang pelaku

usaha sangat dibutuhkan kemampuan untuk mencari peluang dalam bisnisnya.

4. Masyarakat Kota Cilegon kurang memiliki jiwa kepemimpinan, kurang tegas dan kurang disiplin dalam menjalankan usahanya, sehingga banyak pelaku bisnis di Kota Cilegon yang tidak berjalan dengan baik.
5. Masyarakat Kota Cilegon kurang memiliki kemampuan manajerial, hal ini karena banyak pelaku usaha tidak memanaj usahanya dan tidak memisahkan mana uang pribadi dan mana uang usaha.

Segala permasalahan diatas dapat menghambat keberhasilan usaha seseorang. Perilaku kewirausahaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Tanpa adanya perilaku kewirausahaan yang baik dan positif maka keberhasilan usaha pun tidak akan tercapai. Seorang wirausaha akan berhasil dalam usahanya apabila memiliki perilaku kewirausahaan. Permasalahan tersebut diperkuat dengan survey yang telah dilakukan oleh UPT-PEM. Secara spesifik, masalah usaha kecil yang ada di kota Cilegon yaitu: Rendahnya perilaku kewirausahaan, pinjaman dana bergulir dipandang sebagai hibah oleh masyarakat, tingginya tunggakan pinjaman kurang lancar, sarana kerja terbatas, kemampuan teknis pegawai belum memadai, kesejahteraan pegawai rendah.

Berdasarkan fakta di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "**PENGARUH PERILAKU KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KEBERHASILAN USAHA PARA PENERIMA PINJAMAN MODAL USAHA (Survey Di Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Grogol Kota Cilegon)".**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah, terlihat bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana gambaran perilaku kewirausahaan dan keberhasilan usaha para penerima pinjaman UPT-PEM di Kecamatan Grogol Kota Cilegon?
2) Bagaimana pengaruh perilaku kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha para penerima pinjaman UPT-PEM di Kecamatan Grogol Kota Cilegon?

1.3. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui gambaran perilaku kewirausahaan dan keberhasilan usaha para penerima pinjaman UPT-PEM di Kecamatan Grogol Kota Cilegon.
2) Untuk mengetahui pengaruh perilaku kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha para penerima pinjaman UPT-PEM di Kecamatan Grogol Kota Cilegon

1.4. Manfaat Penelitian

1) Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah ilmu kewirausahaan, khususnya terkait dengan keberhasilan usaha yang bisa dicapai dengan memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2) Secara praktis
   a. Bagi Pengusaha : diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha penerima pinjaman, sehingga diharapkan kedepannya para wirausaha bisa lebih meningkatkan faktor keberhasilan usaha.
   b. Bagi Dinas terkait : sebagai bahan pertimbangan dinas terkait dalam hal ini UPT-PEM untuk lebih memperhatikan dan selektif dalam memilih penerima pinjaman bisa dilihat dari prospek usaha yg dilakukan penerima pinjaman agar dapat meningkatkan keberhasilan usaha mikro/kecil di kota Cilegon.